

**KONVERGENSI KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI
PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA
KABUPATEN SAMOSIR**

**COMMUNICATION CONVERGENCE IN IMPLEMENTATION OF TOURIST
DESTINATION DEVELOPMENT
OF KABUPATEN SAMOSIR**

¹⁾ **Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A**

²⁾ **Dr. Karyaman Sinaga, MAP**

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Dharmawangsa Medan

Jl. Yos Sudarso, No. 224

*Email: cutalma@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK

Untuk menjadi destinasi wisata yang menjadi pilihan wisatawan, maka diperlukan analisis kebijakan pengembangan pariwisata dalam perspektif komunikasi yang benar-benar dapat membangun destinasi wisata Kabupaten Samosir. Maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konvergensi komunikasi dalam implementasi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Samosir.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari Kantor Pemerintahan Kabupaten Samosir, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Samosir dan Tokoh Masyarakat Kota Samosir. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah kota sebagai Nahkoda dalam pengembangan destinasi wisata Kabupaten Samosir seharusnya memberi jalan keberhasilan pada pengembangan destinasi wisata Kabupaten Samosir, namun dilihat dari prinsip kolaboratif konvergen, komunikasi konvergensi yang dilakukan para pelaku pengembangan destinasi wisata Kabupaten Samosir belum terjadi secara seimbang, padahal seharusnya para pelaku komunikasi dalam pengembangan destinasi wisata memiliki peran yang sama-sama penting selama proses pengembangan berlangsung. Karena pada model konvergen, masing-masing pelaku pengembangan merupakan partisipan (pihak-pihak yang berpartisipasi), oleh karena itu, konvergen komunikasi cukup efektif untuk dikembangkan dalam implementasi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Samosir.

ABSTRACT

To become a tourist destination that is the choice of tourists, it is necessary to analyze tourism development policies from a communication perspective that can really build tourist destinations in Samosir Regency. So the problem in this research is how communication convergence in the implementation of tourism destination development in Samosir Regency.

This research was conducted with a qualitative approach. Sources of data were obtained from the Samosir Regency Government Office, Samosir Regency Arts and Culture Tourism

Office and Samosir City Community Leaders. Data collection techniques using interview techniques, observation and documentation. While the data analysis in this study was carried out using the Miles and Huberman model.

The results showed that the involvement of the city government as the captain in the development of tourist destinations in Samosir Regency should provide a way of success in the development of tourist destinations in Samosir Regency, but seen from the convergent collaborative principle, convergence communication carried out by the actors of developing tourist destinations in Samosir Regency has not occurred in a balanced manner, even though communication actors in the development of tourist destinations should have an equally important role during the development process. Because in the convergent model, each development actor is a participant (participating parties), therefore, convergent communication is effective enough to be developed in the implementation of tourism destination development in Samosir Regency.

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Samosir merupakan salah satu destinasi prioritas wisata nasional yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam mendukung daya saing Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata nasional yang diprioritaskan. Berdasarkan Data dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, terdapat 75 (tujuh puluh lima) objek wisata berupa wisata alam, wisata sejarah, dan wisata budaya di Kabupaten Samosir. Keindahan alam, peninggalan sejarah, kekayaan budaya dan fenomena tinggalkan letusan Gunung Toba yang dimiliki Kabupaten Samosir merupakan potensi pariwisata yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang melimpah baik wisatawan lokal maupun mancanegara bila dikembangkan dan dikelola dengan baik.

Hal ini sejalan dengan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian”, Sejalan dengan visi pembangunan tersebut, maka Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir menetapkan Visi Kabupaten Samosir yaitu “Samosir Menjadi Destinasi Wisata Unggulan Di Indonesia Menuju Pariwisata Kelas Dunia” dengan memiliki tagline “Negeri

Indah Kepingan Surga” sebagai branding kotanya. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2016-2021) diharapkan Kabupaten Samosir akan menjadi ikon pariwisata berkelas dunia di Indonesia.

Untuk pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Samosir dan visi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya tersebut, ditetapkanlah sebuah kebijakan pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara Nomor 474 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir. Berdasarkan Keputusan Bupati ini, telah ditetapkanyabeberapa objek wisata unggulan yaitu: Makam Tua Raja Sidabutar di Desa Tomok Parsaoran Kecamatan Simanindo, Kawasan Tuktuk Siadong di Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo, Batu Kursi Persidangan di Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo, Museum Huta Bolon di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo, Pantai Pasir Putih Parbaba di Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan, Aek Rangat Pangururan di Kelurahan Siogung-ogung Kecmaatan Pangururan, Menara Pandang Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Aek Sipitu Dai Kecamatan Sianjur Mula-mula, Batu

Sawan di Desa Sari Marrihit Kecamatan Sianjur Mula-mula, Air Terjun Efrata di Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian, dan Air Terjun Naisongop di Desa Sianjur Mula-mula Kecamatan Sianjur Mula-mula.

Sesuai dengan kebijakan di atas, pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan pengembangan objek wisata dengan melakukan pembagian atau klasifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi objek wisata. Kebijakan yang dimaksud merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan di tingkat lokal dalam pengembangan objek wisata untuk mengurangi disparitas antar wilayah dalam pemerataan kesejahteraan publik.

Untuk menjadi destinasi wisata yang menjadi pilihan wisatawan, maka diperlukan analisis kebijakan pengembangan pariwisata dalam perspektif komunikasi yang benar-benar dapat membangun destinasi wisata Kabupaten Samosir. Maka, berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konvergensi komunikasi dalam implementasi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Samosir

B. LANDASAN TEORI

Rogers dan Adhikarya (1978) menyarankan perlunya dirumuskan suatu pendekatan baru dalam proses komunikasi yang dilakukan manusia, yaitu suatu pendekatan konvergensi yang didasarkan pada model komunikasi yang sirkular, menggantikan model linear yang umumnya dianut selama ini. Agar aspek komunikasi lebih berhasil mencapai sasarannya, serta dapat menghindarkan kemungkinan-kemungkinan efek yang tidak diinginkan, tentunya harus mempertimbangkan hal tersebut.

Model komunikasi konvergen sendiri didefinisikan sebagai suatu proses konvergen (memusat) dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai kesaling pengertian

(konsensus). Menurut model ini komunikasi dikatakan efektif apabila tercapai pemahaman bersama antara pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Disini tidak lagi dikenal istilah sumber dan penerima, tetapi lebih disebut sebagai partisipan (pihak-pihak yang berpartisipasi).

Komponen utama dari model konvergen adalah informasi (*uncertainly*), konvergensi, saling pengertian, kesepakatan bersama, tindakan bersama, jaringan hubungan sosial (*network relationship*). Dalam mekanisme pengembangan, model komunikasi ini kemudian dijadikan sebagai landasan dalam penguatan pemberdayaan sosial (*social empowerment*). Menurut Sumardjo, alasan pendekatan konvergen lebih tepat di era globalisasi, karena pendekatan ini lebih memungkinkan terjalannya integrasi (*interface*) antara kepentingan semua pihak (*stakeholders*). Pendekatan ini lebih menempatkan keberadaan masyarakat dengan aspek kepentingan dan kemampuannya agar lebih dikenal dan dihargai, sehingga lebih mendorong terjadinya partisipasi masyarakat yang tinggi sehingga komunikasi menjadi lebih efektif.

Demolingo (2015) juga turut memberikan pandangan bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata, pemerintah harus terlibat membangun sebuah institusi manajemen pariwisata, meningkatkan sumber daya manusia, membangun infrastruktur dari fasilitas wisata yang masih kurang serta membentuk sebuah kerjasama antara pemerintah dengan pemangku kepentingan termasuk masyarakat.

C. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti melakukan pengamatan terhadap subjek dan objek penelitian agar dapat

memahami perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan dari masyarakat. Sumber data diperoleh dari Kantor Pemerintahan Kabupaten Samosir, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Samosir dan Tokoh Masyarakat Kota Samosir. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, dimana dalam model ini analisis data dimulai dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang ketiganya merupakan suatu siklus dalam memperkuat pengambilan kesimpulan (Sutopo, 2006)

D.HASIL DAN PEMBAHASAN

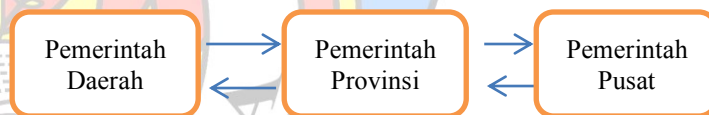
Keputusan Bupati Samosir untuk melakukan klasifikasi (*cluster*) terhadap destinasi wisata berdasarkan penilaian kualitas objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir merupakan awal (*starting point*) dari proses komunikasi pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat. Keputusan pemerintah dalam pengklasifikasian pengembangan objek wisata juga merupakan hasil komunikasiantara pemerintah dengan masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat.

Proses selanjutnya dilakukan melalui proses komunikasi politik yang diputuskan di tingkat lembaga pemerintah daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir. Sedangkan koordinasi dari pemerintah di tingkat pusat dan di tingkat provinsi memiliki kekhususan sesuai dengan program pembangunan untuk kepentingan pengembangan objek wisata. Hal ini sesuai dengan penyampaian dari Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir Bapak Sahat Manurung bahwa:

“Pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan di daerah

sebagai program pembangunan nasional selalu turun untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan sebelum dilaksanakan program pembangunan, jadi sebelum memulai proyek pembangunan pemerintah pusat selalu di awali dengan kunjungan untuk melakukan koordinasi”

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat telah berjalan dalam melakukan perencanaan pembangunan khususnya dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Samosir sebagai objek wisata unggulan, objek wisata prioritas, dan objek wisata rintisan. Gambaran koordinasi pengembangan destinasi wisata dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Koordinasi Pengembangan Destinasi Wisata

Sedangkan koordinasi dalam usaha pengembangan destinasi wisata yang dilakukan pemerintah daerah dengan masyarakat belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan objek wisata. Keikutsertaan masyarakat melalui komunikasi interaktif yang telah diupayakan pemerintah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan dalam komunikasi antara pihak pemerintah, pengusaha (stakeholders) dan masyarakat masih terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak ada kesepahaman dalam program pembangunan yang dilaksanakan. Proses komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi belum membuahkan hasil yang signifikan

dalam mendukung pemerintah Kabupaten Samosir dalam pengembangan destinasi wisata.

Analisis dari beberapa permasalahan berkaitan dengan analisis konvergensi komunikasi dalam implementasi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya Sosialisasi

Kebijakan dalam pengembangan destinasi wisata sangat memerlukan dukungan dari masyarakat. Kemampuan aparatur pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap beberapa kebijakan menjadi tantangan, contohnya pantai pasir putih Parbaba sebagai objek wisata yang akan dikembangkan. Komunikasi yang berjalan antara pemerintah dengan masyarakat belum maksimal sehingga masyarakat belum siap untuk menyambut wisatawan. Hal tersebut terbukti ketika di konfirmasi kepada salah satu tokoh pemuda di Desa Situngkir Luhut Haloho, disampaikan bahwa:

“sosialisasi menjadi tantangan berat bagi pemerintah Kabupaten Samosir dalam mensosialisasikan pengembangan objek wisata, terutama agar berperan menjadi pekerja yang dapat melayani wisatawan, masyarakat yang ada di kawasan wisata masih merasa terhina untuk bekerja melayani wisatawan, padahal kesuksesan pengembangan wisata dimulai dari hal-hal yang kecil yaitu dapat melayani wisatawan”

Maka memang sangat penting untuk mempersiapkan masyarakat dalam mendukung pengembangan objek wisata. Hal seperti ini juga disampaikan oleh Ernani Rustiadi (2001) bahwa melalui pengembangan wilayah diharapkan akan dapat mengatasi persoalan pluralitas,

persoalan sosial budaya, maupun persoalan keragaman sumberdaya alam. Selanjutnya perencanaan wilayah lahir guna menjawab tantangan ketidakseimbangan pembangunan secara spasial, disparitas, pendapatan antar wilayah, aglomerasi berlebihan di wilayah tertentu.

Membangun kesiapan masyarakat coba dilakukan melalui komunikasi yang dibangun terhadap kelompok sadar wisata (pokdarwis). Pemerintah telah melakukan komunikasi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata Bapak Punguan Situmorang bahwa:

“Pihak Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir memberikan kesempatan kepada kami setiap minggu untuk berkomunikasi tentang pelaksanaan kelompok sadar wisata. Setiap permasalahan dapat kami sampaikan untuk mencari solusi atas permasalahan dalam pengembangan objek wisata”.

Namun ternyata meskipun sudah coba dilakukan program-program sosialisasi dan membuka forum diskusi kepada masyarakat, masih tujuan utama dari kegiatan ini belum membuka perspektif berfikir masyarakat setempat.

b) Ketidakharmonisan Masyarakat Kab.Samosir dengan Masyarakat Perantau

Komunikasi pengembangan objek wisata yang dilakukan di Kabupaten Samosir memerlukan peran stakeholder sehingga pengembangan objek wisata dengan berbasis pada masyarakat pihak swasta lebih memungkinkan untuk dilaksanakan. Ketidakharmonisan dengan masyarakat perantau belum terjalin dengan baik karena belum ada saling kepercayaan dengan masyarakat yang

ada di Kabupaten Samosir. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kelompok sadar wisata, yaitu Bapak Punguan Situmorang bahwa:

“Masyarakat perantau belum siap untuk menerima kemajuan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Samosir. Hal ini sejalan dengan pembangunan nasional yang memprioritaskan pembangunan pariwisata dan khususnya pariwisata di kabupaten Samosir “.

c) Dampak Proses Demokrasi dan Politik

Proses pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Samosir telah menghasilkan dampak negatif dalam proses implementasi pengembangan objek wisata. Kelompok yang menang dan kelompok yang kalah dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Samosir telah menimbulkan ketidakharmonisan dalam membangun pariwisata di Kabupaten Samosir yang menuntut kebersamaan dan persatuan untuk keberhasilan pengembangan objek wisata.

Beberapa hal yang menghambat komunikasi pengembangan objek wisata memerlukan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa jalur yang dilakukan pemerintah Kabupaten Samosir dilakukan melalui:

a) Kegiatan Wisata (*Event Tourism*)

Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan event-event pariwisata sekaligus memanfaatkan untuk menyampaikan visi dan Misi kepada masyarakat dan pihak swasta untuk mendapatkan dukungan dalam pengembangan objek wisata. Hal ini disampaikan oleh Bupati Samosir Drs.Rapidin Simbolon MM dalam acara *Manguras Tao* tanggal 31 Maret 2018 yaitu:

“Pemerintah Kabupaten Samosir dan masyarakat bersama-sama harus menjaga kelestarian budaya sekaligus juga menjaga kelestarian Danau Toba. Menjaga kebersihan Danau Toba untuk kelestariannya karena samosir adalah untuk Indonesia. Semangat wisata dari tepian danau toba harus bangkit untuk dapat menghormati sesama agar dapat memajukan pariwisata. Laporkan atau sampaikan apa yang menjadi kendala-kendala dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir dan sampaikan yang sudah baik atau *share* yang sudah baik dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir”

Sosialisasi yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kabupaten Samosir merupakan sosialisasi secara umum yang berlaku untuk seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir. Dalam konteks pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir maka sosialisasi menjadi pendekatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat agar mendukung implementasi kebijakan pengembangan objek wisata.

b) Kelompok Sadar Wisata

Komunikasi pengembangan objek wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir secara intens dilakukan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Hal ini disampaikan oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Situngkir Bapak Punguan Situmoraang.

“Sebagai ketua kelompok sadar wisata saya tidak ada merasa kurang dalam melakukan

komunikasi dengan pihak pemerintah, karena setiap saat kami dapat menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau persoalan dalam pengembangan objek wisata Parbaba kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir”

Sumberdaya Manusia

Pengembangan wilayah objek wisata di Kabupaten Samosir sejalan dengan membangun sumber daya manusia melalui sistem pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance*) dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik maka sangat diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam manajemen pengembangan objek wisata. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia dalam manajemen pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir adalah:

- a) Kekurangan Jumlah Sumberdaya Manusia.

Berdasarkan data pada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Samosir berjumlah 47 orang, dan beberapa jabatan masih belum terisi. Kekurangan staf sebanyak 21 orang dan untuk eselon IV yakni seksi usaha sarana prasarana serta jasa pariwisata sebanyak 1 orang. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam proses pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir.

- b) Kualitas Sumberdaya Manusia

Kemampuan aparatur pemerintah dalam melakukan kerjasama sangat diperlukan dalam proses pengembangan obyek wisata di Kabupaten Samosir. Selain kemampuan aparatur pemerintah maka kemampuan sumberdaya masyarakat karena sangat menentukan dalam proses

implementasi kebijakan pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir.

Masyarakat di Kabupaten Samosir secara umum masih menjadikan pertanian menjadi mata pencaharian utama. Hal ini merupakan tantangan yang harus dijawab dengan melakukan kreativitas dalam pengembangan objek wisata pertanian agar sejalan dengan pengembangan objek wisata. Dengan demikian akan terjadi pergeseran (*transisi*) menuju daerah wisata sebagaimana perencanaan pengembangan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Samosir tentang klasifikasi pengembangan objek wisata.

Kemudian, pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir masih belum maksimal dalam melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial seperti komunitas-komunitas wisata atau pihak swasta maupun lembaga-lembaga pemerintah (SKPD). Hal ini terlihat dari banyaknya fasilitas wisata yang belum terpenuhi dalam memenuhi kebutuhan wisatawan yang sebenarnya dapat dimaksimalkan melalui kerjasama yang kuat antarapemerintah dengan pihak *stakeholder*.

Dalam mendukung kepariwisataan di Kabupaten Samosir yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani merupakan tantangan dalam melakukan pengembangan objek wisata. Pemerintah bersama dengan *stakeholder* belum dapat meningkatkan pengembangan objek wisata sehingga masyarakat belum dapat diberdayakan sesuai dengan situasi demografi penduduk. Demikian pula terhadap potensi-potensi masyarakat lainnya yang belum dimanfaatkan karena lemahnya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak swasta. Industri kerajinan masyarakat dan potensi masyarakat Kabupaten Samosir

lainnya sangat memerlukan pemberdayaan yang menunjukkan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga memerlukan kelembagaan dalam pengembangan objek wisata. Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mendukung pengembangan industri pariwisata memerlukan kelembagaan yang kuat untuk melakukan koordinasi untuk meningkatkan potensi yang ada di masyarakat. Demikian halnya dengan peran lembaga sosial lainnya baik organisasi kepemudaan maupun organisasi masyarakat lainnya yang juga diperlukan dalam mendukung pengembangan objek wisata. Sesuai dengan dasar teori yang dipergunakan maka pengembangan sumberdaya manusia tetap mengacu pada aspek pengenalan, penguatan, dan perlindungan sebagai dasar pemberdayaan masyarakat.

Salah satu potensi masyarakat dalam bidang pertanian di Kabupaten Samosir adalah: padi, jagung, kopi, bawang, dan umbi-umbian. Namun karena kurangnya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat belum dapat bersaing sehingga hasil pertanian tidak bernilai tinggi. Peningkatan produktifitas hasil pertanian yang tidak diikuti dengan kerjasama antar lembaga terkait akhirnya tidak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah dari pengembangan objek wisata.

Pemerintah Kabupaten Samosir masih belum menerapkan sinergitas dengan berbagai lembaga sebagai bukti bahwa sektor pariwisata menjadi *leading sector*. Bidang pariwisata yang telah menjadi prioritas dalam pemerintahan daerah Kabupaten Samosir akhirnya belum memberikan kepercayaan kepada

masyarakat untuk mendukung pengembangan objek wisata. Hal ini mengakibatkan bidang pariwisata hanya akan menjadi pekerjaan sampingan bagi masyarakat.

Sebagaimana disampaikan oleh Risma Simarmata, pedagang makanan dan minuman di pantai pasir putih parbaba bahwa:

“pedagang yang berjualan di pasir putih parbaba berjualan hanya pada hari sabtu dan minggu serta pada liburan nasional lainnya. Jadi pekerjaan dalam melayani wisatawan ini hanya dilakukan sebagai sampingan saja, namun pekerjaan utama masyarakat di sini adalah bertani. Pertanian yang dilakukan adalah dengan menanam jagung, bawang, kopi, atau padi sebagai tumpuan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”

c) Lemahnya Penegakan Aturan

Penegakan aturan yang mendukung pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir masih lemah sehingga belum menunjukkan peran yang besar dalam mendukung pengembangan objek wisata. Hal ini menuntut penegakan hukum yang tegas sehingga dapat mendukung implementasi pengembangan objek wisata.

Beberapa penegakan aturan di Kabupaten Samosir yang masih belum ditegakkan antara lain: pertama; aturan dalam pengelolaan hewan ternak agar tidak dilepaskan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan, kedua; aturan pelayanan fasilitas transportasi wisata yang sangat lemah karena tidak dilakukan secara professional.

Dari beberapa permasalahan yang terjadi pada aspek sumberdaya sangat

diperlukan adanya solusi yang diharapkan dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir yaitu:

a) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global maka peningkatan sumberdaya manusia menjadi keharusan apabila tidak ingin tertinggal dengan negara-negara lain khususnya dalam pengembangan objek wisata. Persaingan dalam perdagangan global sangat ditentukan oleh negara yang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing bukan ditentukan oleh negara yang memiliki banyak kekayaan alamnya.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga berkaitan dengan kualitas pengelolaan kegiatan wisata. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir dalam mendukung pengembangan objek wisata Pantai Pasir Putih Parbaba telah memiliki kesiapan dalam melakukan event-event wisata namun tetap memerlukan peningkatan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir Bapak Daulat Nainggolan yakni:

“Aparatur Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir memiliki kemampuan dalam pengembangan objek wisata, hal ini dikarenakan sumberdaya manusia yang ada telah memiliki pengalaman dalam mengelola event-event pariwisata. Namun peningkatan kualitas sumberdaya manusia harus tetap dilakukan agar dapat lebih baik. Kesiapan dalam pelaksanaan event pariwisata dilakukan melalui koordinasi

antar dinas yang ada sehingga dapat melakukan pembagian tugas-tugas dalam pelaksanaan kegiatan”.

b) Melakukan Kreatifitas Pengembangan Objek Wisata

Aparatur pemerintah daerah sangat dituntut dapat melakukan penyesuaian (akselerasi) dalam pengembangan objek wisata sesuai dengan kondisi sumberdaya manusia dan sumberdaya alamnya. Nurkse dan Myrdall dalam Rustiadi (2001) menyatakan paradigma parsial sesuai untuk negara-negara berkembang dalam rangka pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah yang dilakukan memerlukan penyesuaian dengan masing-masing daerah sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.

c) Mengupayakan Label Halal

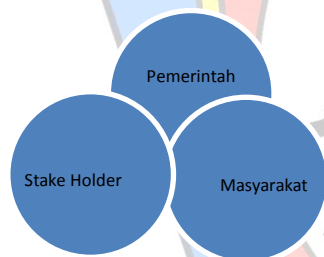
Untuk mendukung pengembangan objek wisata yang berkelanjutan maka hasil sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Samosir memerlukan penguatan daya saing dengan mendapatkan label halal. Masyarakat memiliki hasil pertanian yang sangat potensial untuk dipasarkan secara nasional maupun internasional agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

E. KESIMPULAN

Keterlibatan pemerintah kota sebagai Nahkoda dalam pengembangan destinasi wisata Kabupaten Samosir seharusnya memberi jalan keberhasilan pada pengembangan destinasi wisata Kabupaten Samosir, karena peran pemerintah dengan seluruh SKPD nya tidak hanya sebagai penyedia jasanamun dengan perencanaan administratif yang terukur dapat menjadikan kekuatan penuh bagi terwujudnya keberhasilan

pengembangan destinasi wisata Kabupaten Samosir. Tidak hanya itu, banyaknya dukungan dari stakeholder menjadikan visi ini tidak dapat terlaksana sendiri, namun menjadi sebuah tujuan kolaboratif yang dikerjakan secara bersama-sama.

Dengan prinsip kolaboratif konvergen, peran masing-masing pelaku pengembangan destinasi wisata Kabupaten Samosir harus terjadi secara seimbang dan sama-sama penting selama proses pengembangan berlangsung. Karena pada model konvergen, masing-masing pelakupengembangan merupakan partisipan (pihak-pihak yang berpartisipasi) dalam proses komunikasi konvergen. Oleh Karena itu, konvergen komunikasi cukup efektif untuk dikembangkan dalam implementasi pengembangan desitasi wisata Kabupaten Samosir.



Gambar 2. Pelaku Konvergensi Komunikasi dalam Implementasi Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Samosir
Sumber: Data Olahan

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas; Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Andri. 2006. *Perspektif Pembangunan Wilayah Pedesaan*. Jurnal Inovasi, Vol. 6 (18).
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta: Jakarta
- Demolingo, Ramang Husin. 2015. *Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Desa Bongo Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Manajemen Pariwisata, Volume 1, No. 2, Januari 2015, ISSN: 2406-9116
- Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Kabupaten Samosir, Tahun 2015
- Ife, Jim & Tesorieno, Frank. 2008. *Community Development; Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Jupir, Maksimilianus Maris. 2013. *Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Manggarai Barat)*. Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, Vol. 1, No. 1, Januari 2013 E-ISSN: 2338-1647
- Kartassmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat-Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Penerbit PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta
- Lestari, Susi. 2009. *Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Wisata Kembang Arum, Sleman)*. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2011 Tentang RIPPARNAS 2010
– 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Samsir
Tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2016-
2021

Surat Keputusan Bupati Samsir Nomor
474 Tahun 2017 Tentang
Klasifikasi Objek Wisata di
Kabupaten Samsir

